PERBEDAAN ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM, DAN HUKUM ADAT

Vadel Hermana Praja
Email: vadelhermana10@gmail.com
No BP: 2110003600148
Universitas Eka Sakti Padang

A. PENDAHULUAN

Hukum hakekatnya merupakan gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk serta mempunyai banyak aspek dimensi dan faset. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya), dibentuk dan membentuk tatanan masyarakat, dimana bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya. Sehingga dalam dinamikanya hukum dapat dikondisi dan mengkondisikan masyarakat karena tujuan utamanya yaitu mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai) dan kecenderungan modernism (membawa, menganalisisasi dan mengarahkan perubahan).Antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya mempunyai hubungan erat dan saling berkaitan didalam menjalankan fungsinya. Apabila dari berbagai ilmu sosial tersebut ditinjau dari aspek keluarnya,maka akan timbul berbagai macam ilmu pengetahuan tentang hukum.

Disiplin hukum tidak hanya mencakup ilmu-ilmu hukum, tetapi juga filsafat hukum dan politik hukum. Ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengertian dan ilmu tentang kenyataan. Sehingga ilmu-ilmu hukum tidak hanya mencakup ilmu kaedah dan ilmu pengertian saja melainkan juga mencakup ilmu kenyataan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ilmu kenyataan (*Tatsachenwissenschaft /seinwissenschaft*) yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau

sikap tindak . Adapun yang termasuk dalam ilmu kenyataan adalah antropologi hukum, sosiologi hukum dan hukum adat.

Dengan demikian disiplin ilmu hukum disatu sisi bersifat real, yang ruang lingkupnya manusia, kebudayaan, dan lingkungan alam. Ketiganya menjadi obyek ilmu kenyataan hukum. Dan disisi lain hukum bersifat idiil yang bersumber dari ajaran filsafat etika, filsafat estetika, dan filsafat logika. Ajaran filsafat etika dan filsafat estetika ruang lingkupnya mengenai nilai, asas dan kaedah. Nilai dan asas menjadi obyek filsafat hukum, dan kaedah menjadi obyek ilmu hukum. Sedangkan filsafat logika yang unsurnya metodik, sistematis, dan pengertian menjadi dasar ilmu pengertian hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun makalah ini yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara antropologi hukum, sosiologi hukum dan hukum adat.

B. PEMBAHASAN

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Pengertian lain dari antropologi hukum yaitu suatu ilmu yang mempelajari kenyataan sosial yang berhubungan dengan budaya hukum suatu masyarakat (perwujudan nilai-nilai budaya hukum). Antropologi hukum mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat lalu bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*sosial control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*sosial order*) dalam masyarakat. Adapun studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan

fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.

Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain. Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana.

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum adalah pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan

sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan. Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum. Adapun sifat dari Antropologi Hukum adalah sebagai berikut:

- Interdisipliner adalah sifat antropologi hukum yang saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan sesuatu
- Interdependensi adalah sifat Antropologi hukum yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis dan empiris menyoroti/meneliti pengaruh hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Dengan kata lain, sosiologi hukum mempelajari kenyataan hukum yang berhubungan dengan struktur dan proses sosial. Pada sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tak hanya dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuan untuk menunjukkan adanya tujuan serta nilai tertentu yang ingin dicapai dalam hukum. Sosiologi akan bisa mengingatkan orang kepada adanya informasi mengenai hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaannya dari suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan diatas.

Menurut Brade Meyer pada buku "*Sociology of the law*" sosiologi dalam hukum menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan

proses internalnya hukum. Selain itu, untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.

Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk menggambarkan hukum yang sebenar-benarnya berlaku dalam pergaulan masyarakat, yang implisit berlaku bukan yang eksplisit menurut kaidah-kaidah hukumnya yang ideologis. Dalam sosiologi hukum nampak adanya saling pengaruh mempengaruhi antara hukum dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang lain, misalnya pengaruh ekonomi, pengaruh agama dan sebagainya. Dengan demikian nampak seolah-olah batas antara sosiologi hukum dan antropologi hukum menjadi samar-samar, diarenakan seolah-olah tujuannya sama.

Pemikiran Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiric atau factual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama Sosiologi Hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut di atas berbeda dengan ilmu hukum normative yang memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini Sosiologi Hukum mencoba untuk memperlakukan system hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain, yang terdapat dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis yakni :

-) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.

) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (emprical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Tugas utama sosiologi hukum adalah menyelidiki apa yang seharusnya menjadi tugas hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan tugas tersebut, maka mempelajari dan mengetahui sosiologi hukum adalah penting untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum dan fenomena-fenomena sosial yang mempengaruhi hukum; mengetahui mana hukum yang hidup (living law) dan yang tidak hidup dalam masyarakat; mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan pentaatan terhadap hukum dan mengetahui apakah produk badan legislatif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Adapun ruang lingkup ilmu sosiologi hukum yakni:

) Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. sebagai contoh dapat disebut misalnya: Hukum Nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya : gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan

) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. sebagai contoh dapat disebut misalnya:

- Undang-undang tentang hak cipta
- Undang-undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik

3.Hukum Adat

Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas. Selain itu hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang

merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

Hukum adat diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat. Sistem hukum adat pada dasarnya berdasarkan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (unwritten law).

Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat. Contoh beberapa hukum adat di Indonesia adalah hukum adat di Lampung, hukum adat di Minangkabau dan Potong jari di Papua. Tidak semua adat dapat dijadikan sumber hukum adat meskipun sebagai pengendalian social tapi juga harus memperhatikan kemanusiaan. Contohnya penghapusan diberlakukannya hukum adat masyarakat suku Naulu Maluku yang masih menganut pemberian mahar pernikahan berupa kepala manusia yang dipenggal. Meskipun masyarakat setempat percaya bahwa hal itu akan membawa kelanggengan bagi rumah tangga mereka nantinya, tetapi hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur Negara hukum. Beberapa corak hukum adat adalah :

- Tradisional;
- Keagamaan/kepercayaan;
- Kebersamaan (bercorak komunal);
- Konkrit dan visual;
- Terbuka dan sederhana;
- Dapat berubah dan menyesuaikan;

Perkembangan dan corak hukum adat sangat ditentukan oleh perilaku adat yang membentuknya. Keberadaan hukum adat dalam system hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia. Eksistensi hukum adat dalam

hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh berlakunya system hukum adat itu sendiri yang mampu menegakkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial.

4. Dasar Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan Hukum adat

4.1 Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum adat

Hukum adat tidak sama pengertiannya dengan antropologi hukum walaupun ada persamaan dalam teori dasar-dasar mempelajarinya yaitu mulai dari masyarakat sederhana. Namun metode pendekatan dan latar belakang sejarah kedua ilmu ini berbeda. Kemudian berdasarkan pengertiannya nama kedua ilmu ini berbeda, namun boleh saja dikatakan serupa tetapi tidak sama. Serupa maksudnya disini adalah objeknya sama tetapi metode pendekatannya tidak sama. Antropologi hukum adalah spesialisasi antropologi budaya sedangkan ilmu hukum adat adalah bagian dari ilmu hukum. Berikut tabel perbedaan dasar antara antropologi hukum dengan hukum adat

Tabel 1. perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum adat

Perbedaan	Antropologi Hukum	Hukum Adat
Objek	Perilaku manusia menyangkut hukum	Norma-norma hukum diluar hukum perundangan
Metode pendekatan	Holistic	Normative-juridis (khusus)
Penelitian	Bersifat lapangan dengan tidak perhatian pada kasus perselisihan	Bersifat kepustakaan dan dokumentasi dengan memperhatikan norma-norma
Norma hukum	Norma-norma hukum yang nyata berlaku pada titik akhir	Norma-norma hukum yang dikehendaki berlaku pada titik awal

4.2 Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

Hampir tidak ada perbedaan objek antara sosiologi hukum dan antropologi hukum dan kedua ilmu tersebut sama-sama tidak melakukan pendekatan normatif saja, tetapi melakukan penekanan pada kenyataan yang empiris baik yang nampak dalam keputusan petugas hukum, dan yang nampak dalam perilaku. Namun berdasarkan sejarah antropologi hukum dengan sosiologi hukum itu berbeda.

Tabel 2. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

Perbedaan	Antropologi Hukum	Sosiologi Hukum
Objek	Hukum bukan barat, tidak tertulis	Hukum barat yang telah dipengaruhi, hukum tertulis
Subjek	Masyarakat sederhana	Masyarakat modern
Persepektif	Budaya	Sosial
Penelitian	Kualitatif, studi kasus	Kuantitatif, sampel
Kajian	Mengkaji hukum dengan mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya seperti sejarah, lingkungan hidup, keluarga, pemukiman, politik dsb.	Mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yg ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara analitis dan empiris (sesuai dengan kenyataannya).

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia yang bersangkutan dengan hukum. Antropologi hukum mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.
2. Sosiologi hukum merupakan hukum dalam perspektif ilmu sosial yang melakukan konstruksi hukum didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri.
3. Hukum adat merupakan hukum yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..